



PROGRAM KEMITRAAN

ARI DAHFID, S.Pd.,MH (PTP AHLI MUDA)
KETUA TIM KEMITRAAN LPMP PROV. NTB



KEMITRAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)

MERDEKA BELAJAR

Seluruh pemangku kepentingan pendidikan (termasuk siswa) menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya



“Sekolahkan Anak Indonesia”

Angka Partisipasi Tinggi

>95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah; >70% pada jenjang pendidikan tinggi

“Dorong Pembelajaran Siswa”

Hasil Belajar Berkualitas

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan >90% tingkat penempatan kerja

“Tidak Ada Anak yang Tertinggal”

Distribusi yang Merata

baik secara geografis maupun status sosial ekonomi

dapat dicapai melalui perbaikan pada:



Infrastruktur dan Teknologi

- Platform pendidikan nasional berbasis teknologi
- Infrastruktur sekolah/ kelas masa depan



Kebijakan, Prosedur, dan Pendanaan

- Kontribusi eksternal (pemerintah dan swasta)
- Mekanisme akreditasi
- Pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel
- Otonomi satuan pendidikan



Kepemimpinan, Masyarakat, dan Budaya

- Kompetensi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah
- Kolaborasi dan pembinaan (lokal dan global) antara guru, satuan pendidikan, dan industri



Kurikulum, Pedagogi, dan Asesmen

- Kurikulum dan asesmen nasional

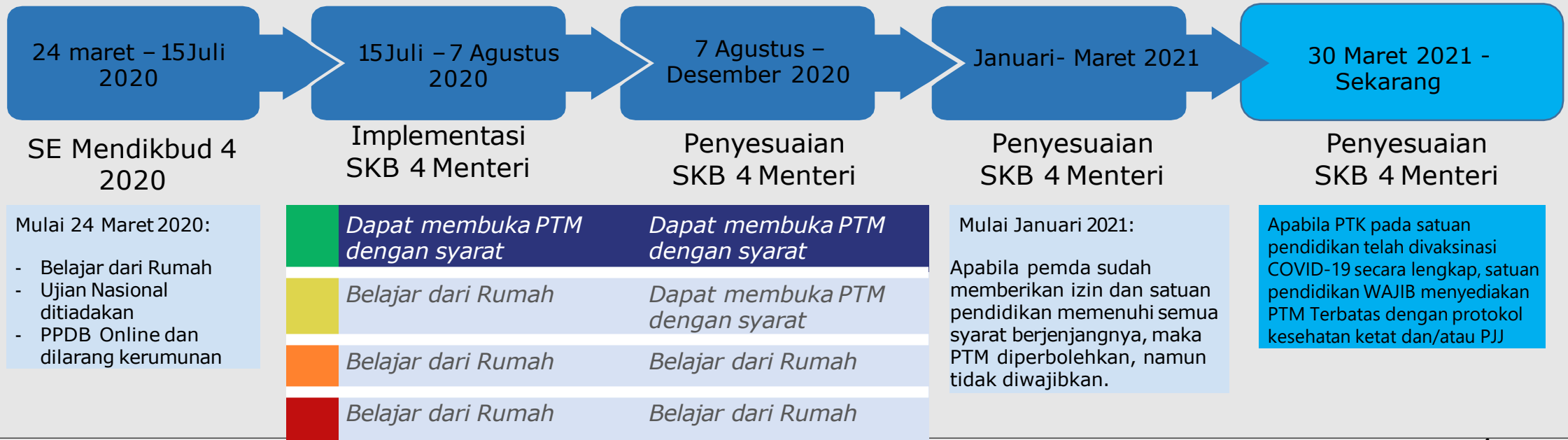


KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DI MASA COVID-19

Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran

Prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID -19 adalah

- Kesehatan dan keselamatan prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan
- Mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi COVID-19



KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DI MASA COVID-19



PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

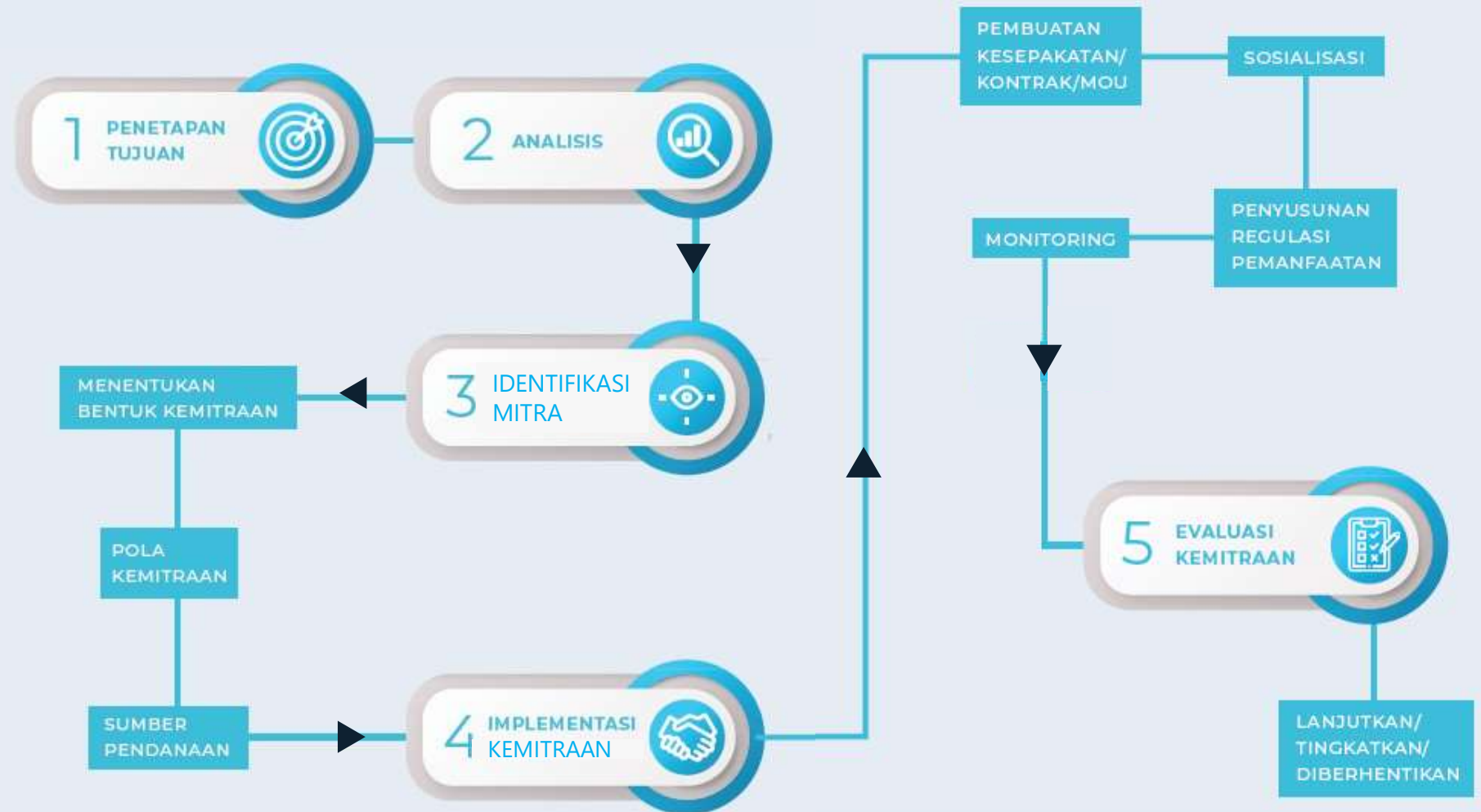
SKB 4 MENTERI 30 MARET 2021

Apabila PTK pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, satuan pendidikan **WAJIB** menyediakan **PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat** dan/atau **PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)**. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

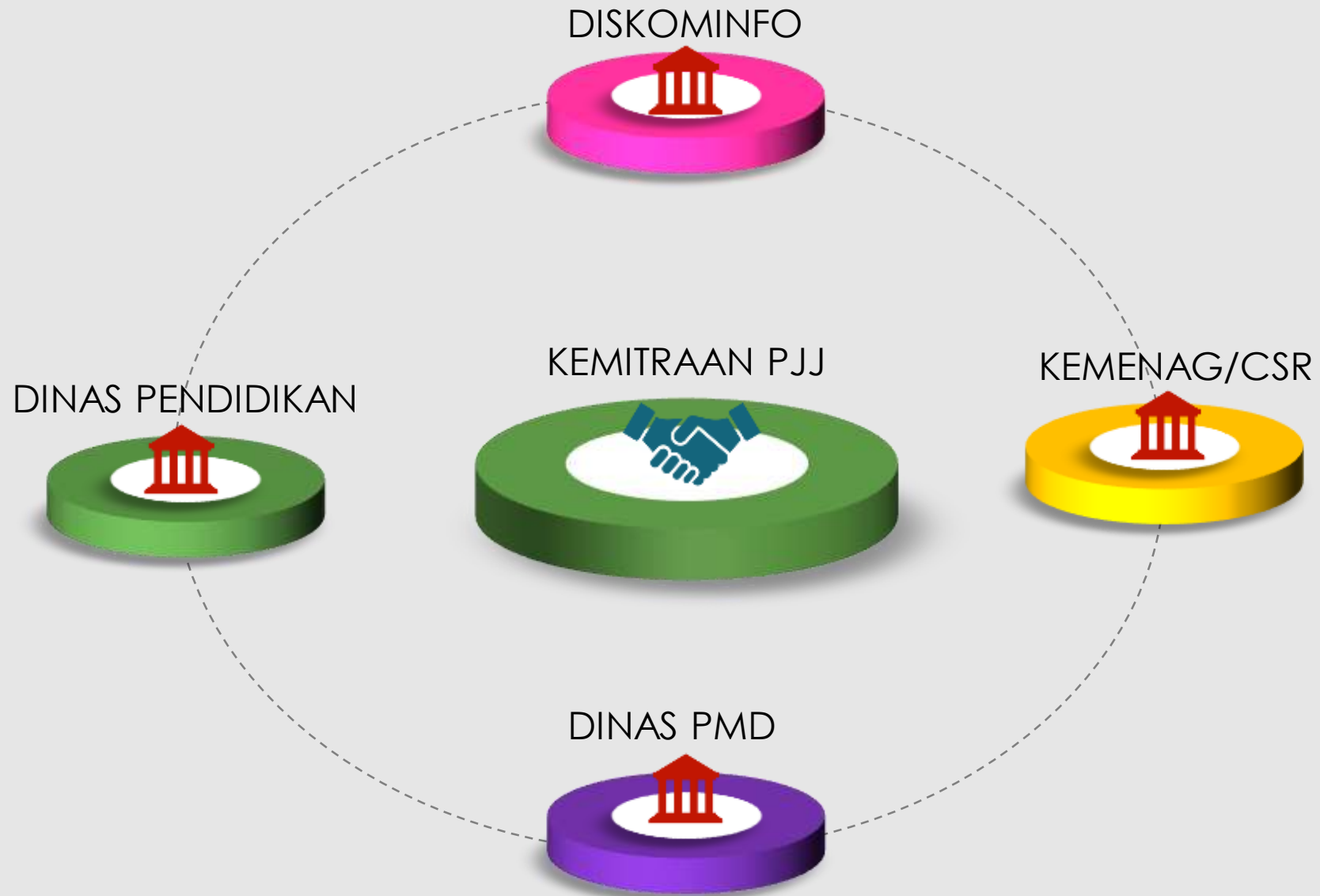
KEBIASAAN/POLA BARU DALAM PEMBELAJARAN DI TAHUN AJARAN 2021/2022

1. Pembelajaran Kebiasaan Baru (Sinergi PTM terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh)
2. Pembelajaran Tatap Muka merupakan sesuatu yang berharga di masa pandemi dan terdapat risiko penularan COVID-19
3. Pilihan Pembelajaran Jarak Jauh bagi orang tua/wali yang anaknya tidak bersedia diikutsertakan dalam PTM terbatas.

LANGKAH PELAKSANAAN KEMITRAAN PJJ



PARA PIHAK





**PROGRAM PENYIAPAN
CALON KEPALA SEKOLAH DAN
PENGAWAS SEKOLAH**

LATAR BELAKANG

**Kesenjangan antara regulasi dan implementasi
pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah**

◦ **REGULASI (PERSYARATAN PENGANGKATAN)**

- ▶ Rekrutmen (Proyeksi dan Seleksi)
- ▶ Seleksi Administrasi
- ▶ Seleksi Substansi
- ▶ Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- ▶ Penilaian Sikap dan Kinerja

◦ **IMPLEMENTASI (KONDISI FAKTUAL DI DAERAH)**

- ▶ Tidak dibuat proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- ▶ Diangkat tidak melalui mekanisme yang seharusnya

PERSYARATAN PENGANGKATAN (Intervensi Pusat)

- Lulus seleksi calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. seleksi substansi dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi Pembina.
- Telah mengikuti diklat fungsional calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP serta NRKS dan NRPS dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
8. Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
10. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3815/B.B13/HK/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah
11. **Surat Keputusan Dirjen nomor 19732/B.B13/HK/2018 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Diklat Tahap 1 (13 P4TK dan 34 LPMP untuk penyiapan dan penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah**
12. Juknis Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Tahun 2020

TUJUAN

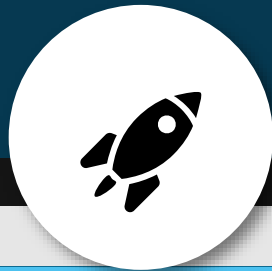
**“MENGHADIRKAN CALON KEPALA SEKOLAH DAN CALON
PENGAWAS SEKOLAH YANG **KOMPETEN** DAN **PROFESIONAL**”**

Alur Penyiapan CKS dan CPS



MODA PENYIAPAN CKS DAN CPS

MODA DARING



dilakukan melalui kegiatan *synchronous* maupun *asynchronous* dalam *Learning Management System (LMS)* pada semua tahapan

MODA KOMBINASI



dilaksanakan dengan menggabungkan antara daring dan tatap muka langsung, yaitu secara daring dengan kegiatan *synchronous* maupun *asynchronous* dalam LMS pada tahapan OJT dan secara tatap muka langsung pada tahapan IST (kecuali seleksi)

MODA LURING



dilaksanakan secara tatap muka langsung pada semua tahapan

Pemilihan moda didasarkan pada analisis kondisi geografis peserta dan analisis kebutuhan

PERAN LPMP

- Menjalin Kemitraan dengan stakeholder terkait seperti LPPKSPS, Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi dan BKD Kab/Kota;
- Memfasilitasi pelaksanaan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta Penguatannya;
- Menerbitkan STTPP;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada LPPKSPS dan Ditjen GTK, Kemendikbudristek

Daerah yang difasilitasi

NO	Kab/Kota/Provinsi	Jenis Fasilitas	Tahun
1	KOTA MATARAM	Seleksi dan Diklat CKS	2018, 2021
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	Seleksi dan Diklat CKS	2018, 2021
3	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	Seleksi dan Diklat CKS	2017-2018
4	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Seleksi dan Diklat CKS dan CPS	2016, 2021
5	KABUPATEN LOMBOK UTARA	Seleksi dan Diklat CKS Serta Penguatan KS	2018, 2021
6	KABUPATEN SUMBAWA	Seleksi dan Diklat CKS	2017, 2021
7	KABUPATEN BIMA	Seleksi dan Diklat CKS dan CPS	2017-2021
8	KOTA BIMA	Seleksi dan Diklat CKS dan CPS	2018, 2021
9	PROVINSI NTB	Seleksi dan Diklat CKS	2018, 2020

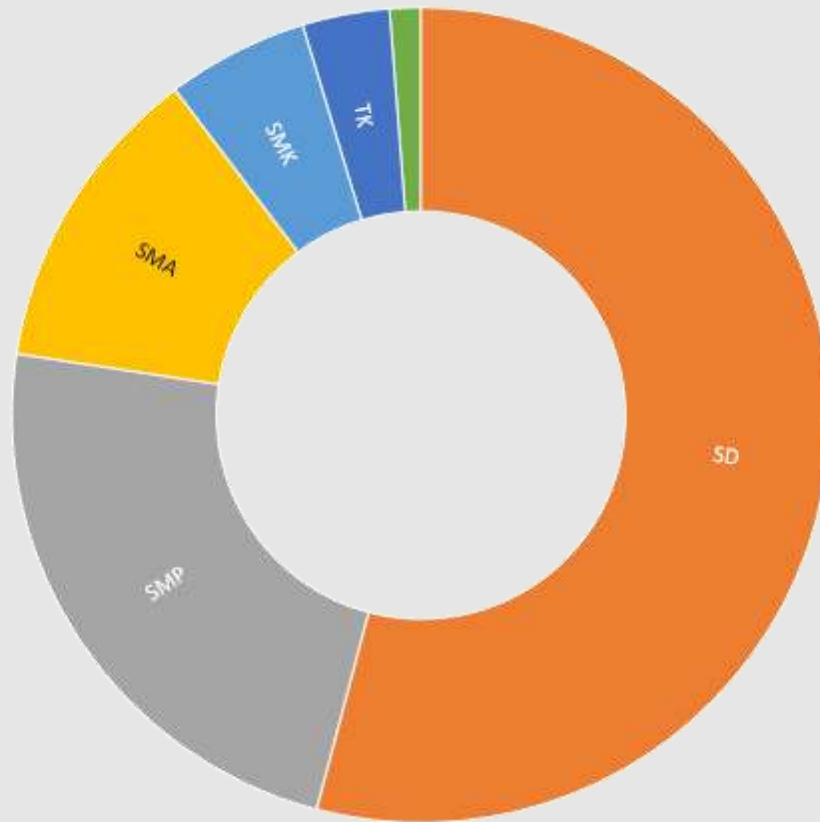
Sebaran CKS yang difasilitasi

No	KABUPATEN / KOTA	Tahun 2016-2018						JUMLAH	Tahun 2019-2021						JUMLAH	JUMLAH TOTAL
		CKS BERDASARKAN JENJANG							CKS BERDASARKAN JENJANG							
		TK	SD	SMP	SLB	SMA	SMK		TK	SD	SMP	SLB	SMA	SMK		
1	KOTA MATARAM	0	15	5	0	0	0	20	0	49	9	0	0	0	58	78
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	0	20	0	0	3	1	24	1	64	15	0	0	0	80	104
3	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	13	174	30	1	21	4	243	0	0	0	0	0	0	0	243
4	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0	20	0	0	2	1	23	0	18	17	0	0	0	35	58
5	KABUPATEN LOMBOK UTARA	0	22	18	0	0	0	40	0	16	4	0	0	0	20	60
6	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KABUPATEN SUMBAWA	0	63	5	0	2	2	72	0	8	12	0	0	0	20	92
8	KABUPATEN DOMPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KABUPATEN BIMA	3	117	67	1	3	2	193	0	95	25	0	0	0	120	313
10	KOTA BIMA	0	20	0	0	2	1	23	3	27	0	0	0	0	30	53
11	PROVINSI NTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	46	20	70	70
JUMLAH		16	451	125	2	33	11	638	16	506	145	6	45	21	363	1001

Sebaran CPS yang difasilitasi

No	KABUPATEN / KOTA	Tahun 2018-2021						JUMLAH
		CPS BERDASARKAN JENJANG						
		TK	SD	SMP	SLB	SMA	SMK	
1	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0	12	2	0	0	0	14
2	KABUPATEN BIMA	0	30	10	0	0	0	40
3	KOTA BIMA	3	9	21	0	0	0	33
4	PROVINSI NTB	0	0	0	10	55	25	90
JUMLAH		3	51	33	10	55	25	177

Persentase Sebaran Setiap Jenjang



- ★ TK 3,45%
- ★ SD 54,10%
- ★ SMP 23,30%
- ★ SMA 12,32%
- ★ SMK 5,60%
- ★ SLB 1,23%

OUTPUT

CKS

- Terbentuknya CKS yang mampu memadukan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dengan pengalaman empirik (kontekstual) sesuai karakteristik calon kepala sekolah
- Terbentuknya kemampuan calon kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik
- Terbentuknya kemampuan calon kepala sekolah dalam menentukan strategi penyelesaian masalah sehingga dapat membangun budaya belajar sekolah dalam satu ekosistem persekolahan
- Terbentuknya kemampuan kepemimpinan calon kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk membantu penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah, yang bermuara pada terwujudnya **student wellbeing**

CPS

- Terbekali kompetensi yang diperlukan Calon Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah
- Terbentuknya potensi pengawasan Calon Pengawas Sekolah yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik yang bermuara pada terwujudnya **students wellbeing**
- Terbentuknya kemandirian Calon Pengawas Sekolah dalam kegiatan peningkatan keprofesian pengawasan

TANTANGAN/KENDALA

- Belum adanya kejelasan proyeksi kebutuhan yang dibuat oleh daerah;
- Koordinasi dengan pihak Pemda, LPPKSPS Solo dan Ditjen GTK yang memerlukan waktu yang cukup lama;
- Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan;
- Data yang tidak valid

SOLUSI

- Melakukan koordinasi intens dengan pihak LPPKSPS Solo, Ditjen GTK dan Pihak Daerah;
- Memaksimalkan kuota kebutuhan sesuai dengan anggaran yang ada;
- Melakukan verifikasi dan validasi secara cermat bersama-sama dengan LPPKSPS Solo dan Ditjen GTK

REKOMENDASI

- PEMDA: Menyusun proyeksi kebutuhan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, memastikan ketersediaan anggaran, melakukan verifikasi dan validasi data secara tepat dan berkoordinasi lebih awal dengan para pihak;
- KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH; Memetakan dan memberikan usulan kepada Dinas Dikbud calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang layak;
- LPMP dan LPPKSPS; Melakukan pendampingan konsultatif dan asimetris kepada Pemda dalam meningkatkan mutu Pendidikan melalui program penyiapan CKS dan CPS.

TERIMAKASIH

